



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANALISA KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensif Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

RIYAN ARFIL

11770513210



PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021 M/1442 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

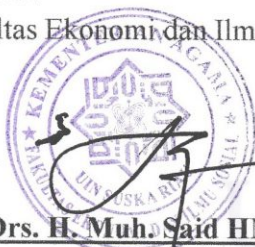
NAMA : RIYAN ARFIL
 NIM : 11770513210
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL SKRIPSI : ANALISA KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA
 PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI DALAM
 PENGEMBANGAN PARIWISATA

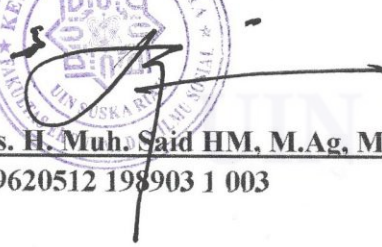
DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING


Devi Deswimar, S.Sos, M.Si
 NIK. 130 411 027

MENGETAHUI

DEKAN
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial




Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PROGRAM STUDI
 Ilmu Administrasi Negara



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIYAN ARFIL
 NIM : 11770513210
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : ANALISA KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA PEMUDA
 DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

HARI/TANGGAL UJIAN : RABU / 21 APRIL 2021

PANITIA PENGUJI

KETUA PENGUJI

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI,

PENGUJI I

Mashuri, MA
 NIP. 19770721 201411 1 002

PENGUJI II

Irdayanti, S.IP, MA
 NIP. 130 411 030

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISA KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

OLEH:

RIYAN ARFIL
NIM 11770513210

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pengembangan Pariwisata. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pengembangan Pariwisata. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Dengan metode ini peneliti memaparkan dan menguraikan kata-kata yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa dan menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengembangan pariwisata secara indikator belum terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kata Kunci : Kebijakan, Pengembangan Pariwisata



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, keluarga serta pengikutnya.

Skripsi ini berjudul **“ANALISA KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA”**. Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi yang sederhana ini guna lebih bermanfaat dikemudian hari. Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan trimakasih kepada:

1. Kedua orangtua, Ayahanda Ramli dan Ibunda Indriyani tercinta, yang telah membesarkanku, mendidik, membimbing serta memberikan cinta dan kasih sayangnya dengan penuh kesabaran. Ibu yang melahirkan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

senantiasa mendo'akan disetiap langkahku, terimakasih untuk seluh cinta dan kasih sayang yang telah engkau berikan.

2. Terimakasih buat Adikku Rindi Yani, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan do'anya kepada penulis sehingga dapat melaksanakan penyusunan Skripsi ini dapat berjalan lancar.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu
4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tempat dimana penulis menimba banyak ilmu disana.
5. Bapak Dr. Kamaruddin. S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.H.I, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibunda Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Skripsi, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan Skripsi ini.
8. Ibunda Abdiana Ilosa, S.AP, M.PA selaku Penasehat Akademis sekaligus yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

10. Kepada seluruh Pejabat/Aparatur Pemerintahan Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti, yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi yang dibutuhkan.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan saya dan terkhusus sahabat Lokal B angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat dan berukar pemikiran dengan penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga semua bimbingan, dorongan dari semua pihak yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 01 April 2021

Penulis,

RIYAN ARFIL
NIM 11770513210

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Kebijakan.....	14
2.2 Pengertian Strategi	18
2.3 Kebijakan Pariwisata	23
2.4 Pengembangan Pariwisata	26
2.5 Penelitian Terdahulu	31
2.6 Pandangan Islam Terhadap Pariwisata	34
2.7 Definisi Konsep	39
2.8 Konsep Operasional.....	40
2.9 Kerangka Pemikiran	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4 Informan Penelitian.....	43
3.5 Teknik Analisa Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti	46
4.2 Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti	47

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3	Gambaran Singkat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti	48
4.4	Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti	51
4.5	Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti...	52
4.6	Sumber Daya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti	60

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1	Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Pariwisata.....	62
5.2	Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Pariwisata.	73

BAB VI PENUTUP

6.1	Kesimpulan	81
6.2	Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tempat – Tempat Pariwisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	3
Tabel 1.2	Tempat – Tempat Bersejarah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	5
Tabel 1.3	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti.....	6
Tabel 1. 4	Data kunjungan wisatawan di Kabupaten Kepulauan Meranti	9
Tabel 2.1	Kriteria Umum Pariwisata Halal	37
Tabel 2.2	Konsep Operasional	40
Tabel 3.1	Informan Penelitian	44
Tabel 4.1	Jumlah ASN Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Pendidikan.....	60
Tabel 4.2	Jumlah ASN Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Jenis Kepegawaian	61
Tabel 5. 3	Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti.....	76
Tabel. 5.4	Data Perusahaan Penanam Modal (investasi) Dalam Negeri (PMDN).....	78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti	59





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan-pembangunan yang ada di daerah. Pembangunan di daerah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah yang harus dilaksanakan demi mencapai kesejahteraan masyarakat daerah yang menjadi tujuan dari otonomi daerah. Salah satu sektor yang dapat memberikan manfaat besar bagi pemerintah dan masyarakat adalah sektor pariwisata. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut dijelaskan tentang pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya dimana setiap daerah berhak dan diwajibkan untuk mengembangkan dan mengelola potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Pembangunan sektor pariwisata merupakan sektor yang dianggap penting sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan ekonomi yang lebih cepat, karena pendapatan Negara tidak mungkin selamanya bergantung dari sumber energi yang dihasilkan oleh alam seperti sektor migas, karena sumber energi seperti migas tidak bisa diperbaharui dan lama kelamaan akan habis. Tetapi dari sektor non migas, seperti pariwisata ini dapat membantu terutama pada masa sekarang dengan meningkatnya tuntutan dan beban hidup masyarakat serta banyak lagi fenomena sosial lainnya, membuat masyarakat pada masa sekarang ini sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

membutuhkan sesuatu yang sejenak dapat melupakan masalah maupun beban hidup yang sedang dialami, yaitu dengan berwisata.(Hasbyaallah, 2018)

Selain potensi alam dan budaya, keberadaan infrastruktur aksesibilitas udara dan laut yang memadai mampu menjadi pendukung pengembangan daerah sebagai destinasi wisata Indonesia. Sarana dan prasarana kepariwisataan juga perlu mengalami peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan yang memadai. Namun demikian pengembangan kepariwisataan daerah selayaknya dikembangkan dengan tetap mengacu kepada paradigma baru pembangunan kepariwisataan. Kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kompetensi mereka dibidang kepariwisataan dipercaya akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta pengalaman berwisata.(Putri, 2018)

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pengembangan sector pariwisata yang dilakukan dengan baik dan maksimal akan mampu menarik wisatawan domestic maupun wisatawan asing untuk datang dan membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisata.(Fivylandra, 2018)

Dibentuknya pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai Kabupaten yang baru dibentuk, tentunya potensi-potensi yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti akan lebih ditingkatkan, salah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satunya dalam sektor pariwisata yang mulai diperhatikan. Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai potensi yang cukup besar dikembangkan, bukan hanya pada objek wisata alam tetapi terdapat pula wisata sejarah atau cagar budaya. Berikut beberapa data objek wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 1.1 Tempat – Tempat Pariwisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	KECAMATAN	TEMPAT-TEMPAT PARIWISATA
1.	Tebing Tinggi Barat	a. Tasik Nambus b. Pantai alai c. Tasik Penekat
2.	Tebing Tinggi	a. Pantai dorak b. Kuliner Dermaga Camat c. Vihara Sejahtera Sakti d. Masjid Darul Ulum e. Wisata Mangrove Jembatan Pelangi
3.	Tebing Tinggi Timur	a. Desa Sungai Tohor b. Tasik Hulu Mahmut
4.	Rangsang	a. Tasik Air Hitam b. Tasik Sepatu c. Tasik Air Putih d. Tasik Lumut
5.	Rangsang Pesisir	a. Pulau Setahun b. Pantai Paus Indah
6.	Rangsang Barat	a. Desa Wisata Bokor b. Pantai Anak Setatah c. Wisata mangrove anak setatah d. Wisata mangrove desa Lemang e. Pantai Motong
7.	Merbau	
8.	Pulau Merbau	a. Pantai Beting Beras b. Pantai Dara Sembilan c. Pantai Ceria
9.	Tasik Putri Puyu	a. Tasik Putri Puyu b. Pantai tanjung pisang

(Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat begitu banyak potensi objek wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Diantaranya Tasik Nambus di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Tasik Air Hitam dan Tasik Air putih di Kecamatan Rangsang, Pulau Setahun dan Pantai Paus Indah di Kecamatan Rangsang Pesisir, Desa Wisata Bokor dan Pantai Motong di Kecamatan Rangsang Barat, Pantai Beting Berang, Pantai Dara Sembilan dan Pantai Ceria di Kecamatan Pulau Merbau, Tasik Putri Puyu di Kecamatan Tasik Putri Puyu.

Suatu objek wisata yang didukung oleh fasilitas yang memadai merupakan hal yang sangat baik demi mendongkrak wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung. Tapi pada kenyataannya fasilitas pendukung objek wisata pada objek wisata di Kabupaten Kepulauan Meranti belum bisa dikatakan memadai dan memberi kenyamanan pada wisatawan yang berkunjung. Jika ditelusuri lebih lanjut, banyak sekali kekurangan dalam segi pembangunan pada objek wisata di Kabupaten Kepulauan Meranti. Padahal pembangunan yang baik akan lebih memberikan daya tarik tersendiri pada objek wisata tersebut. Hal ini dilihat dari akses jalan yang rusak dan banyaknya toilet yang tidak bersih serta dapat dikatakan tidak layak digunakan.

Tidak hanya itu pantai seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah atau dinas terkait dalam mengembangkan dan pengelolaannya justru luput dari pantauan karena keadaan pantai yang tidak terawat lagi. Sejauh ini peran pemerintah dalam pengembangan sarana dan prasana ekowisata Pantai Kualu Merbau ada beberapa belum tersedia karena masih dalam proses pengembangan

oleh masyarakat setempat, namun pantai ini sudah masuk dalam destinasi objek wisata di Kabupaten Kepulauan Meranti. (Aisyah, 2018)

Tabel 1.2 Tempat – Tempat Bersejarah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	KECAMATAN	TEMPAT-TEMPAT BERSEJARAH
1.	Tebing Tinggi Barat	a. Makam Panglima Sampul b. Makam Habib Muhammad Ibrahim c. Makam Engku Zainab
2.	Tebing Tinggi	a. Makam Tengku Bagus Syaid Thoha b. Makam Tengkoa Soelong Tjantik Saijet Alwi Tengkoa Temenggoeng Marhorm Boentat c. Kolam Telaga Bening d. Puskesmas TebingTinggi (ex. Rumah SakiBelanda) e. Vihara Sejahtera Sakti f. Makam Datuk Syekh Darah Puteh
3.	Tebing Tinggi Timur	a. Makam Noh di PulauTiga b. Kapal Motor Milik Belanda di Pulau Jadi
4.	Rangsang	a. Makam Gemala Sari b. Makam Tok Batin Kerimbang
5.	Rangsang Pesisir	a. Makam Raja Pasai b. Areal benda antic Dinasti Ming
6.	Rangsang Barat	a. Sungai Bokor b. Makam BatinGalang c. Makam Raja Mandau d. Makam PanglimaHitam
7.	Merbau	a. Makam Keramat di tepi Pelabuhan Belitung
8.	Pulau Merbau	a. Makam Panglima Kamal b. Makam Datuk Setia Indera c. Makam Panglima Baki dan Istri d. Makam Panglima Musa (Panglima Darussalam) e. Keramat Guci f. Kawasan Adat “MandiBejamu” masyarakat Suku Akit
9.	Tasik Putri Puyu	a. Makam Sikoyan b. Bangunan Bekas Distrik Militer Belanda

(Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti 2021)

Dari tabel 1. 2 dapat dilihat begitu banyak tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, tidak hanya Potensi objek wisata yang banyak tetapi tempat bersejarah juga banyak di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini

menandakan bahwa terbentuknya Kabupaten ini memiliki sejarah di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten di Kepulauan Meranti.

Tidak hanya destinasi wisata dan tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti event tahunan yang lebih dikenal dengan festival perang air cukup menarik wisatawan domestik maupun internasional yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jenis Pendapatan Daerah	Jumlah Rupiah Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Pajak Hotel	717.982.641	900.416.349	900.416.349	907.318.279
2.	Pajak Hiburan	1.542.787.683	1.943.241.893	1.943.241.893	2.304.907.318
3.	Pajak Restoran	120.806.449	130.454.698	130.454.698	194.807.783

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti)

Dari tabel 1.3 dapat diketahui bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang sangat baik dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Dapat diketahui bahwa pajak-pajak yang dihasilkan dari sektor pariwisata rata-rata mampu mencapai target yang telah ditentukan. Untuk itu sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang potensial untuk terus dikembangkan guna menyumbang pendapatan daerah yang lebih besar lagi. Dari jenis pendapatan daerah diatasdapat diketahui jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata setiap tahunnya meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata terbesar didapat dari pajak hiburan kemudian pajak hotel dan yang terakhir pajak restoran.

Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial dalam menyumbang sisi penerimaan daerah. Definsipajak daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Untuk itu pemerintah daerah melakukan tindakan pelestarian pariwisata dengan mengeluarkan kebijakan berupa memberikan jaminan bagi setiap wisatawan yang mengikuti event pariwisata perang air dilakukan dengan cara menyediakan sarana-sarana penunjang. Tindakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bagi setiap wisatawan yang mengikuti kegiatan perang air, juga dilakukan dengan cara menjamin keamanan bagi setiap wisatawan tersebut. Adapun cara pemerintah yakni dengan cara berkoordinasi dengan pihak keamanan seperti Polisi, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan juga organisasi kemasyarakatan seperti Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) Selatpanjang, Majelis Konghucu Indonesia (MAKIN) Selatpanjang, dan Barisan Ansor Serabaguna (BANSER) NU. (Prayogi, 2020)

Dalam mengembangkan pemasaran pariwisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan berbagai macam kegiatan promosi wisata melalui Periklanan (*Advertising*), Penjualan Personal (*Personal selling*), Publisitas (*publicity*). (Atia, 2018)

Namun, walaupun sudah melakukan berbagai macam cara promosi tetap saja tetap saja pemasaran pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar Pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti Dikenal tingkat nasional maupun mancanegara.

Dalam mengembangkan industri pariwisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti memberi ciri khas daerah tujuan wisata. Hal ini karena jenis makanan yang ada disebuah daerah tujuan wisata dapat menambah daya tarik daerah tujuan wisata tersebut dengan ciri khasnya salah satu kuliner yang terkenal di kabupaten Kepulauan Meranti adalah olahan dasar sagu. Berbagai olahan makanan berbahan dasar sagu seperti mie sagu, lempeng, sempolet, sagu telur, sagu rendang, ongol-ongol sagu, cendol sagu, kerupuk sagu, sagu pilus dan makanan lainnya yang menjadi objek wisata kuliner sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten kepulauan meranti merupakan salah satu wilayah diprovinsi riau yang memiliki potensi sentra tanaman sagu sekaligus sentra konsumsi sagu. (Atia, 2018)

Namun, masalah yang terjadi meskipun sebagai penghasil sagu terbesar di Indonesia, kuliner sagu belum terkenal baik tingkat nasional maupun mancanegara. Berdasarkan observasi peneliti masih banyak yang belum mengetahui tentang hal tersebut. Di provinsi Riau saja masih banyak yang belum tahu tentang kuliner sagu. Pada umumnya, masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sudah mengetahui berbagai olahan kuliner sagu. Oleh karena itu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti perlu menyiapkan kebijakan dan strategi untuk masyarakat diluar Kabupaten Kepulauan Meranti agar kuliner sagu lebih dikenal baik tingkat nasional maupun mancanegara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya baik jika dilihat dari berbagai aspek. Diantaranya yaitu kondisi bangunan yang kurang terawat, lingkungan yang kurang bersih karena kurang efektifnya dalam mengelola kebersihan sehingga masih terdapat tumpukan sampah yang tidak pada tempatnya yang mengganggu kenyamanan pengunjung. Selain itu belum adanya wahana permainan yang bisa dinikmati pengunjung dan pengunjung hanya bisa menikmati pemandangan alam saja sehingga hal itu membuat pengunjung kurang tertarik dengan tempat wisata. (Aisyah, 2018)

Seharusnya pemerintah dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti membenahi fasilitas pariwisata lainnya, seperti sarana dan prasarana objek wisata yang disediakan kurang memadai, keamanan disekitar objek wisata juga harus diperhatikan, seperti kawasan objek wisata yang mengalami kerusakan, pungutan liar dari masyarakat dan parkir kendaraan yang disediakan belum mencukupi, sehingga menyebabkan kemacetan. Dari sarana dan prasarana yang kurang memadai dan dari kemacetan tersebut juga bisa mengurangi minat para wisatawan untuk berkunjung.

Tabel 1. 4 Data kunjungan wisatawan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Tahun	Jumlah Bulan	Wisatawan			
			WNI Masuk	WNI Keluar	WNA Masuk	WNA Keluar
1.	2017	12	4.609	4.524	996	673
2.	2018	12	7.466	8.257	909	867
3.	2019	12	11.958	13.071	1.112	1.133

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti)

Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

peningkatan yang cukup baik, hal ini hendaknya menjadi motivasi bagi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengembangkan pariwisata agar mampu menarik pusat perhatian wisatawan yang akan datang.

Untuk melakukan pengembangan terhadap pariwisata pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam bidang pariwisata memiliki peranan dalam perencanaan program, pengelolaan objek wisata, pengembangan pariwisata serta menetapkan destinasi wisata.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti mengambil kebijakan untuk melakukan pengembangan sektor pariwisata yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, sebagaimana dijelaskan maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisa Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Pariwisata”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Pariwisata?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Pariwisata?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Pariwisata
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pelaksanaan Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Pariwisata.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis adalah bahan untuk menambah pengetahuan dan menjadi tambahan ilmu tentang Administrasi Negara khususnya pada bidang kebijakan publik.
2. Manfaat praktis adalah sebagai informasi pembaca dan peneliti lain serta menjadi bahan untuk dinas atau lembaga yang mengembangkan pariwisata dengan optimal.'

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 6 (enam) bab dan sub bab lainnya, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori yang mendukung penelitian, antara lain Pengertian Pariwisata, Pengertian Kebijakan, Kebijakan Pariwisata, Pengembangan Pariwisata, Penelitian Terdahulu, Pandangan Islam Terhadap Pariwisata, Definisi Konsep, Konsep Operasional, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Informan Penelitian, dan Teknik Analisa Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti, Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti, Gambaran Singkat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti, Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi serta Sumber Daya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini akan dipaparkan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman dari tindakan-tindakan yang diambil yang paling mungkin untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan, kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting dalam suatu organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternative sebagai prioritas program atau pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampak yang dihasilkan dari pengambilan keputusan tersebut.

Menurut Bridgman dan Davis (Suharto, 2013) bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do*”. Artinya, kebijakan publik adalah “apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.

Menurut Harold D Lasswell dan Abraham Kaplan mengatakan kebijakan adalah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. (Islamy, 1992). Carl J. Frederick mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (Islamy, 1992).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pembuatan kebijakan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya menurut Irfan Islamy faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- a. Adanya pengaruh-pengaruh tekanan dari luar,
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konversatisme),
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi,
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar,
- e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. (Islamy, 1992).

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah. Mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. (Syafie, 1999). Selain itu Thomas R. Dye juga mengatakan bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*). (Syafie, 1999)

Dari pendapat yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa model pembuatan perumusan kebijakan yang dipopulerkan oleh Thomas R. Dye, yaitu:

1. Model Sistem

Model sistem ini pertama kali ditemukan oleh David Eston dalam teori sistem politik yang disodorkannya, bahwa kegiatan terdapat serangkaian proses yang saling mempengaruhi. Tekanan dari lingkungan dipandang sebagai masukan (*input*), masukan diproses (*converst*), dan proses tersebut menghasilkan sebuah kebijakan (*output*), selanjutnya umpan balik kelingkungan (*feed back*) dan itulah yang disebut David Eston sebagai suatu sistem kebijakan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Model Elit

Kebijakan elit ini sebagai potensi dan nilai-nilai teori elit masa yang berkuasa. Teori ini lebih membuat rakyat apatis atau miskin akan informasi tentang kebijakan. Elit lebih banyak memiliki kendali sering membentuk opini. Jika dibandingkan dengan cara membentuk opini elit.

3. Manfaat Kelompok

Model kelompok dalam pengambilan kebijakan mengedepankan kebijakan sebagai titik keseimbangan (*equilibrium*). Gagasannya dalam kelompok akan menghasilkan kebijakan yang terbaik.

4. Manfaat Kelembagaan

Merupakan turunan dari ilmu politik tradisional yang menekankan pada struktur kelembagaan ketimbang proses atau pola perilaku.

5. Model Proses

Model ini merupakan salah satu aktivitas politik sehingga memerlukan proses, dan begitu juga halnya dengan kebijakan yang menyertakan rangkaian proses politik.

6. Model Rasionalism

Kebijakan rasional dirancang untuk memaksimalkan kebijakan yang harus dipilih membawa manfaat bagi masyarakat. Rasional disini adalah keputusan yang diperhitungkan secara rasionalitasnya.

7. Model Inkrementalism

Model ini menekankan pada kelanjutan kebijakan pemerintah masa lalu dengan sedikit mengadakan perubahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

- a) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan public yang bersifat kurang mengikut individu-individu;
- b) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
- c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan public;
- e) Adanya suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. (Sunggono, 1994).

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota masyarakat. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya tugas pokok dari pelaksanaan kebijakan adalah untuk mewujudkan tujuan (*goals*) yang terkandung dalam kebijaksanaan itu. Menurut Grindle ada tiga hal pokok dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu:

1. Memerinci tujuan-tujuan yang hendak dicapai,
2. Membentuk program-program kegiatan,
3. Mengalokasikan dana untuk pembiayaan-pembiayaan.

2.2 Pengertian Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa sangsekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak berulang-ulang atau berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian. Jadi pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berkali-kali (Muljadi, 2009). Orang yang melakukan perjalanan disebut traveler, sedangkan orang yang melakukan perjalanan untuk wisata disebut tourist.

Pariwisata merupakan salah satu dasar kebutuhan manusia. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pariwisata akan memenuhi kebutuhan manusia untuk berlibur dan berekreasi, kebutuhan pendidikan dan penelitian, kebutuhan keagamaan, kebutuhan jasmani dan rohani, minat terhadap kebudayaan dan kesenian, kepentingan keamanan, kepentingan politik, dan hal-hal yang bersifat komersialisasi yang membantu kehidupan ekonomi masyarakat. Pariwisata dilakukan baik secara individual, keluarga, kelompok, dan pagiyuban organisasi sosial.

Sedangkan pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Suwantoro mendefinisikan istilah pariwisata, yaitu suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan, dan keperluan usaha lainnya. (Murdiastuti, 2014)

Menurut Instruksi Presiden Nomor 19 Tahun 1969 kepariwisataan adalah kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman. (Muljadi, 2009)

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang ini.

Menurut (Pendit, 2006) mengemukakan jenis-jenis pariwisata yang terbagi menjadi pariwisata budaya, kesehatan, olahraga, komersial, industri, politik, konvensi social, pertanian, maritime (bahari), cagar alam, buru, pilgrim, wisata bulan madu dan wisata petualangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Wisata Budaya

Wisata budaya yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni di daerah tujuan wisata, jenis wisata ini paling populer di Indonesia karena wisatawan yang datang dari luar negeri ke Indonesia ingin mengetahui kebudayaan, kesenian, adat istiadat dan kehidupan seni Indonesia.

2. Wisata Kesehatan

Wisata kesehatan yaitu perjalanan wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat secara jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas yang dapat menyembuhkan, kesuatu tempat yang beriklim menyehatkan dan sebagainya.

3. Wisata Olahraga

Wisata olahraga yaitu perjalanan yang dilakukan dengan tujuan berolahraga, mengikuti atau menyaksikan pesta olahraga ke suatu Negara misalnya Asian Games, berburu, memancing, berenang dan sebagainya.

4. Wisata Komersial

Wisata komersial yaitu perjalanan yang dilakukan dengan maksud untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Wisata Industri

Wisata industri yaitu perjalanan yang dilakukan ke suatu daerah perindustrian dengan tujuan untuk mengadakan penelitian dan peninjauan.

6. Wisata Politik

Wisata politik yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam kegiatan politik seperti ulah tahun perayaan 17 Agustus di Jakarta, perayaan 10 Oktober di Moskow, maupun kegiatan politik seperti konferensi, musyawarah, kongres atau konvensi politik yang selalu disertai dengan darma wisata.

7. Wisata Konvensi

Wisata konvensi yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mengikuti suatu pertemuan seperti konferensi, musyawarah, konvensi dan lain-lain baik yang bersifat nasional maupun internasional.

8. Wisata Sosial

Wisata sosial yaitu pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan seperti kaum buruh, pemuda, pelajar, mahasiswa dan sebagainya.

9. Wisata Pertanian

Wisata pertanian yaitu perjalanan ke suatu proyek-proyek pertanian, perkebunan, lading pembibitan dan sebagainya untuk tujuan studi maupun rekreasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Wisata Maritim (bahari)

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air seperti memancing, berlayar, menyelam dan sebagainya untuk memperoleh suatu kesenangan. Jenis wisata ini disebut juga dengan wisata tirta.

11. Wisata Cagar Alam

Wisata cagar alam yaitu perjalanan yang dilakukan ketempat cagar alam, taman lindung, hutan didaerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran dan keindahan alam, kesegaran udara pegunungan, keajaiban hidup binatang maupun tumbuhan yang jarang terdapat ditempat lain.

12. Wisata Buru

Wisata buru yaitu jenis wisata yang dilakukan disuatu daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah.

13. Wisata Pilgrim

Wisata pilgrim yaitu jenis wisata yang dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok masyarakat seperti kunjungan ke tempat-tempat suci, keramat, makam-makam yang diagungkan, tempat-tempat yang mengandung legenda dan sebagainya.

14. Wisata Bulan Madu

Wisata bulan madu yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan pengantin baru dengan fasilitas khusus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Wisata Petualangan

Dikenal dengan istilah Adventure Tourism, seperti masuk hutan yang tadinya belum pernah dijelajahi yang penuh dengan binatang buas, mendaki tebing yang sangat terjal, terjun ke dalam sungai yang sangat curam dan sebagainya.

Jenis-jenis pariwisata tersebut bisa bertambah, tergantung pada kondisi dan situasi perkembangan dunia kepariwisataan disuatu daerah. Hal ini berkaitan dengan kreativitas para ahli professional yang berkecimpung dalam industri pariwisata. Semakin kreatif dan banyak gagasan yang dimiliki, maka semakin bertambah pula bentuk dan jenis wisata yang dapat diciptakan bagi kemajuan industri pariwisata.

2.3 Kebijakan Pariwisata

Menurut (Pendit, 2006) merumuskan kebijakan pariwisata yaitu segala sesuatu tindakan instansi pemerintah dan badan/organisasi masyarakat yang mempengaruhi kehidupan kepariwisataan itu sendiri. Tetapi kehidupan kepariwisataan sesungguhnya tidak saja dipengaruhi oleh adanya tindakan-tindakan kebijaksanaan, melainkan diakibatkan pula oleh kompleksitas yang timbul dalam pariwisata itu sendiri.

Menurut Biederman (Murdiastuti, 2014) hal penting dalam definisi kebijakan kepariwisataan dengan mengemukakan bahwa prinsip dari kebijakan kepariwisataan adalah harus menjamin Negara maupun daerah mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan pariwisata. Biederman juga menyebutkan bahwa sasaran akhir dari kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pariwisata adalah peningkatan kemajuan Negara atau daerah dan kehidupan warga negaranya.

Menurut Goldner dan Ritchie (Murdiastuti, 2014) mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung disuatu destinasi.

Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Edgell yang mengemukakan bahwa kebijakan pariwisata merupakan kerangka etis yang terfokus pada isu-isu yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif keinginan/kebutuhan masyarakat dengan rencana, pembangunan, produk, pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan pariwisata dimasa yang akan datang, seperti yang dinyatakan berikut ini.

Definisi terakhir yang menjadikan pemasaran, pengembangan produk, dan pelayanan hospitalit memegang peranan penting dalam kebijakan kepariwisataan. Lebih penting lagi, definisi tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakan kepariwisataan bersifat dinamis dan fleksibel dalam melakukann penyesuaian dan penyempurnaan terhadap perkembangan yang terjadi. Kebijakan kepariwisataan terkait erat dengan perencanaan kepariwisataan.

Menurut Edgell (Murdiastuti, 2014) perencanaan kepariwisataan memperkuat kedudukan kebijakan kepariwisataan dalam pembangunan. Edgell mengemukakan bahwa model perencanaan pariwisata mencakup pernyataan visi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan misi yang diikuti oleh serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan taktik dalam pengembangan pariwisata.

Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi secara efektif sebagai arah pembangunann kepariwisataan suatu destinasi. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali konflik kepentingan ditingkat para pengambil keputusan pada saat mengimplementasikan kebijakan maupun perencanaan kepariwisataan yang sebenarnya sudah disepakati bersama sehingga perkembangan pariwisata tidak lagi mengacu pada kebijakan dan perencanaan yang dibuat.

Dalam mewujudkan pembangunan kepariwisataan daerah, arah kebijakan kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan Visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu ”Terwujudnya Meranti sebagai daerah tujuan wisata yang berbasis kearifan lokal dan pengembangan pemuda serta olahraga yang produktif, mandiri dan berprestasi”, maka Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Meranti diarahkan kepada:

1. Meningkatkan destinasi pariwisata Kabupaten yang berdaya saing tinggi dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Daerah.
2. Meningkatkan pemberdayaan pemuda yang produktif, berdaya saing tinggi dan berprestasi dalam dunia olahraga
3. Meningkatkan sarana prasarana pemuda dan olahraga serta pelayanan publik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pada dasarnya adalah hal, usaha, atau cara untuk mengembangkan sesuatu kearah yang lebih baik. Sektor pariwisata merupakan sektor yang diharapkan akan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu, sehingga pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata perlu ditingkatkan melalui kebijakan-kebijakan pengembangan kepariwisataan. Pada dasarnya tujuan utama dari pengembangan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi.

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pasal 4, tujuan pengembangan pariwisata adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa;
- j. Mempererat persahabatan antabangsa.

Menurut (Suwantoro, 2004) unsur pokok yang mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksana pembangunan dan pengembangannya meliputi 5 unsur:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

a. Objek wisata dan daya tarik wisata

Merupakan potensi yang menjadi pendiri kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata. Pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam
- 2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya
- 3) Pengusahaan objek dan daya wisata minat khusus

Daya tarik objek wisata, pada umumnya berdasarkan pada:

- 1) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah dan nyaman
- 2) Adanya ciri khusus atau spesifik yang bersifat langka
- 3) Daya tarik tinggi objek wisata budaya karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat, dan nilai luhur yang terkandung dalam suatu karya manusia pada masa lampau.

b. Prasarana wisata

Merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya didaerah tujuan wisata.

c. Sarana wisata

Merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.

d. Tata laksana dan infrastruktur

Merupakan situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas dan dibawah permukaan tanah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

e. Masyarakat dan lingkungan

Terdiri dari masyarakat, lingkungan dan budaya. Produksi wisata mempunyai beberapa komponen, yaitu:

- 1) Atraksi daerah tujuan wisata
- 2) Fasilitas yang tersedia
- 3) Aksesibilitas ke dan tujuan wisata

Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata berarti masyarakat mengetahui dan menyadari apa yang dikerjakan dan juga masalah-masalah yang dihadapi untuk membangun pariwisata nasional sehingga turut membantu pemerintah dalam menunjang pembangunan pariwisata (Suwanto, 2004).

Menurut(Suwanto, 2004) aspek kebijaksanaan dalam pengembangan pariwisata adalah:

- a. Promosi merupakan pelaksanaan upaya pemasaran yang harus dilaksanakan secara terpadu baik didalam maupun diluar negeri
- b. Aksesibilitas merupakan salah satu aspek penting yang mendukung karena menyangkut pengembangan lintas sektor
- c. Kawasan pariwisata

Pola kebijaksanaan pengembangan pariwisata menurut (Suwanto, 2004) yaitu:

- 1) Kebijakan Umum

Pola kebijaksanaan umum ini meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat,
 - b) Kebijakan pengembangan industri pariwisata,
 - c) Kebijakan pengembangan objek wisata, atraksi wisata, taman rekreasi dan hiburan umum,
 - d) Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana,
 - e) Kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara arus wisatawan, kemampuan menampung, melayani dan menyelenggarakan kepariwisataan,
 - f) Kebijakan pengelolaan,
 - g) Kebijakan pembinaan,
 - h) Kebijakan hukum.
- 2) Arah pola kebijaksanaan pengembangan jalur wisatawan. Pola kebijaksanaan pengembangan jalur wisatawan diarahkan kepada pengembangan jalur wisatawan dan nusantara yang sekaligus dapat meningkatkan jumlah atau diversifikasi paket wisata yang didasarkan pada perkembangan objek wisata.
- 3) Pola kebijakan pengembangan objek wisata, meliputi:
- a) Prioritas pengembangan objek,
 - b) Pengembangan pusat-pusat penyebaran kegiatan wisatawan,
 - c) Meningkatkan kegiatan penunjang pengembangan objek wisata.
- 4) Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana wisata, meliputi:
- a) Akomodasi,
 - b) Restoran,
 - c) Usaha rekreasi dan hiburan umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d) Gedung pertemuan,
- e) Perkemahan,
- f) Pondok wisata,
- g) Mandala wisata,
- h) Pusat informasi wisata,
- i) Pramiwisata.

5) Pola kebijaksanaan pengembangan pemasaran berpedoman kepada:

- a) Peningkatan jumlah dan lama tinggal wisatawan,
- b) Meningkatkan kerjasama yang terpadu antara berbagai sektor,
- c) Mempercepat perkembangan pasar wisata domestik.

6) Kebijakan pengembangan kelembagaan, meliputi:

- a) Penyerahan urusan kepariwisataan,
- b) Pemantapan kedudukan lembaga pemerintah daerah,
- c) Peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas,
- d) Pertimbangan jenis dan kelas lembaga,
- e) Kemampuann bekerja sama.

7) Kebijaksanaan pengembangan industri. Penanaman modal diarahkan kepada:

- a) Penyerahan tenaga kerja, peningkatann mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia,
- b) Pengembangan struktur industri dengan prioritas pada usaha untuk menghasilkan barang ekspor non-migas,
- c) Peranannya sebagai wahana pengembangan teknologi dan memacu pertumbuhan atau perkembangan daerah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dipakai sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian sekarang ini:

1. **Hasbyallah (2018) Analisis Kebijakan Pengembangan Destinasi**

Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Lingga.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana kebijakan pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah oleh pemerintah Kabupaten Lingga?

Dan Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah oleh pemerintah Kabupaten Lingga?

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk

mengetahui kebijakan pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah

oleh pemerintah Kabupaten Lingga. Dan untuk mengetahui hambatan dalam

pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah

oleh pemerintah Kabupaten Lingga. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan

bahwa pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah dengan program

membangun daya tarik wisata alam, budaya dan buatan melalui kegiatan

pagelaran kesenian dan promosi, membangun sarana prasarana dan fasilitas

penunjang pada destinasi wisata, berkerjasama dengan dinas terkait dalam

pembangunan aksesibilitas dan transportasi, dan pemberdayaan masyarakat

melalui pelatihan-pelatihan. Hambatan dalam pengembangan destinasi

pariwisata unggulan daerah yaitu sarana prasarana dan fasilitas pariwisata

yang tidak terawat, status lahan, aksesibilitas dan transportasi, sumber daya

manusia, regulasi (peraturan) dan anggaran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. **Janila Putri (2018) Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pemerintahan Kota Payakumbuh Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.** Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah? Dan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah? Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengidentifikasi, menganalisa dan mendeskripsikan kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dan Untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil dalam penelitian ini, kebijakan pengembangan pariwisata oleh dinas pariwisata pemuda dan olahraga kota payakumbuh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sudah cukup baik. Dimana dengan adanya kebijakan pengembangan pariwisata kota payakumbuh telah mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. **Welsha Fivylandra (2018) Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Agam Dalam Pengelolaan Objek Wisata Muko-Muko.** Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata pada pengelolaan objek wisata muko-muko di Kabupaten Agam oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten agam? Dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan pengembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam dalam pengelolaan objek wisata muko-muko di Kabupaten Agam. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kebijakan pengembangan pariwisata pada pengelolaan objek wisata muko-muko di Kabupaten Agam oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam. Dan Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam ddalam pengelolaan onjek wisata muko-muko di Kabupaten Agam. Hasil dalam penelitian ini, kebijakan pengembangan pariwisata dalam pengelolaan objek wisata muko muko kurang baik. Ini disebabkan karena pelaksanaan kebijakan pengembangan yang dilakukan belum sesuai dengan renstra dinas pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten agam. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di kabupaten agam dalam pengelolaan objek wisata muko-muko juga disebabkan karena rendahnya kualitas SDM dalam melakukann pengelolaan objek wisata dan masih simpang siurnya atas status lahan (kepemilikan tanah). Faktor pendukung dari pelaksanaan kebijakan ini yaitu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukannya pemasaran dan promosi yang baik, aksesibilitas yang baik serta sering diadakannya event (kegiatan) pariwisata.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah pada objek penelitian, variabel penelitian dan tempat penelitian.

2.6 Pandangan Islam Terhadap Pariwisata

Diantara maksud wisata dalam islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan. Dalam Al-Quranulkarim terdapat perintah untuk berjalan dimuka bumi di beberapa tempat. Fungsi wisata berdasarkan beberapa ayat Al-Quran antara lain, mempertebal iman maksudnya dengan memperhatikan semesta, diharapkan semakin sadar bahwa dirinya diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapat rezeki. Allah juga menghidupkan dan mematikan makhluknya.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Q.S Al-An'am ayat 11 yang berbunyi:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾

Artinya: “Katakanlah: ‘Berjalanlah dimuka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.’ (QS. Al-An'am: 11)

Mungkin diantara maksud yang paling mulia dari wisata dalam islam adalah berdakwah di jalan Allah Ta'ala, dan menyampaikan kepada manusia cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Itulah tugas para Rasul dan para Nabi dan orang-orang setelah mereka dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Para Sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa saallam telah menyebar ke ujung dunia untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajak mereka kepada kalimat yang benar, kami berharap wisata yang ada sekarang mengikuti wisata yang memiliki tujuan mulia dan agung.

Yang terakhir dari pemahaman wisata dalam islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Ta'ala, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Karena refreshing jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Q.S Al-Ankabut ayat 20 yang berbunyi:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Ankabut: 20).

Organisasi Konferensi Islam (OKI) memberikan definisi wisata halal, terminologi yang digunakan OKI adalah *Islamic Tourism* yaitu Islam dan pariwisata didasari pada Al-Qur'an 29:20 yang menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan di bumi untuk mengambil pelajaran dari ciptaan Allah dan mengambil rahmat-Nya. *Islamic Tourism* didefinisikan sebagai perjalanan wisata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan Muslim sesuai dengan kaidah Islam. Adapun beberapa istilah yang digunakan selain *Islamic Tourism*, yaitu *Halal Tourism*, *Syariah Tourism*, *Muslim-Friendly Tourism*. (Organisasi Kerjasama Islam, 2017: 4). Peneliti di sini lebih memilih menggunakan wisata halal atau *halal tourism* karena kata tersebut lebih mewakili aspek wisata yang ramah terhadap wisatawan Muslim dan juga mewakili syariah Islam dengan kata 'Halal' yang tidak sekedar mewakili makanan dan minuman, tetapi juga hotel, fasilitas, dan pelayanan sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan *Global Muslim Travel Index* (Global Muslim Travel Index, 2016:7) sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan wisata halal dunia menjelaskan bahwa wisata halal adalah pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan Muslim. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wisata halal, yaitu: pemerintah daerah dapat memenuhi layanan ibadah seperti fasilitas solat; lalu tersedianya makanan dan jaminan dengan label halal, fasilitas umum yang memadai seperti toilet dengan air bersih, layanan maupun fasilitas saat bulan Ramadhan, serta tidak adanya aktivitas minuman beralkohol dan layanan *private* yang dapat membedakan antara perempuan dan laki-laki.

Indonesia sendiri dalam mengembangkan wisata halal mengadopsi dari kriteria *Global Muslim Travel Index* sebagai acuan pembangunan wisata halal. (Pratiwi, 2016). Untuk itu dibentuk suatu badan dibawah naungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur pariwisata di Indonesia, badan khusus bernama Tim Percepatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Pariwisata Halal (TP3H) suatu tim yang diberikan kewenangan dalam membantu pemerintah memetakan, mengembangkan dan memberikan pedoman daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan wisata halal, tim ini kemudian membentuk tiga kriteria umum dalam mengembangkan wisata halal, seperti yang tertera tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Kriteria Umum Pariwisata Halal

Kategori	Indikator
Destinasi Pariwisata (Alam, Budaya, Buatan)	Tersedia pilihan aktivitas wisata, seni, dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi, dan kemusyrikan
	Bila memungkinkan menyelenggarakan minimal satu festival halal life style
	Pramuwisata berpakaian dan berpenampilan sopan
	Tersedia pilihan daya tarik wisata pantai dan pemandian yang terpisah untuk pria dan wanita dan/atau mempunyai aturan pengunjung tidak berpakaian minim
Hotel	Tersedia makanan halal
	Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, seperti Masjid, Mushola dan fasilitas bersuci
	Tersedia pelayanan saat bulan Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan sahur dan buka puasa
	Tidak adanya aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman beralkohol, dan kegiatan diskotik
	Tersedia fasilitas rekreasi kolam renang dan fasilitas kebugaran/gym yang terpisah antara pria dan wanita
	Bila hotel menyediakan fasilitas spa, maka terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita. Terapi tidak menggunakan bahan yang mengandung babi, alkohol maupun produk turunannya
Biro Perjalanan	Menyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum Pariwisata Halal
	Tidak menawarkan aktivitas non-halal
	Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman halal
	Pemandu wisata memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas
	Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan etika Islam

Sumber: Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal (Garit Bira Widhasti, et. All., 2017:8)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dijelaskan juga sebelumnya dalam tulisan Demeiati Nur Kusumaningrum dkk (2017) di mana, konsep wisata halal dipahami sebagai nilai-nilai ajaran Islam yang diimplementasikan sebagai landasan dalam melakukan perjalanan wisata tanpa mendiskriminasikan wisatawan non-muslim. Wisata halal ini dijadikan sebagai *soft power* untuk menarik kunjungan wisatawan Muslim. (Kusumaningrum, Fairuz, Putri, & Amalia, 2017). Sedangkan (Battour & Ismail, 2015) melihat wisata halal adalah setiap objek dan perilaku wisata yang melibatkan orang Muslim dengan menggunakan ajaran-ajaran Islam sebagai pedoman dalam industri pariwisata. Noriah Ramli juga menjelaskan bahwa wisata halal sebagai suatu perjalanan wisata yang memiliki pelayanan sesuai dengan syariah Islam, juga sebagai wisata pilihan bagi wisatawan Muslim untuk menghindari wisata konvensional yang ada menyediakan minuman beralkohol, makanan dengan unsur babi, dan tempat wisata yang tidak memisahkan antara pria dan wanita. (Ramli, 2012:2-3)

Dapat diambil kesimpulan istilah wisata halal, yaitu wisata yang ingin memberikan layanan dan fasilitas wisata kepada wisatawan Muslim yang juga dapat dinikmati oleh wisatawan non-Muslim, di mana setidaknya memenuhi tiga kebutuhan dasar dalam wisatawan Muslim, yaitu: adanya fasilitas dan layanan ibadah yang memadai, tempat tinggal yang ramah terhadap wisatawan Muslim (hotel syariah), makanan dan minuman dengan jaminan halal melalui sertifikasi badan tertentu yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu, serta destinasi wisata seperti wisata alam, budaya, wisata buatan yang dilengkapi dengan

fasilitas atau infrastruktur untuk ibadah, seperti adanya masjid atau musholla di sekitar tempat wisata. (Subarkah, 2018)

2.7 Definisi Konsep

Agar memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian yang jelas dan permasalahan tidak kabur, maka diperlukan beberapa definisi konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

Kebijakan adalah arah atau tuntutan dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah pernyataan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun tindakan dari para pelaksana, baik pemerintahan maupun diluar pemerintahan dalam mewujudkan harapan yang telah ditetapkan tersebut.

Pariwisata adalah seluruh kegiatan yang melakukan perjalanan ke dan tinggal disuatu tempat diluar keseharian untuk jangka tidak lebih dari satu tahun dengan tujuan bersantai/rekreasi.

Kebijakan pariwisata adalah kerangka etis yang terfokus pada isu-isu yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif keinginan/kebutuhan masyarakat dengan rencana, pembangunan, produk, pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan pariwisata dimasa yang akan datang.

Pengembangan pariwisata adalah unsur pokok yang menjadi penunjang di daerah tujuan wisata yang menyangkut dalam pembangunan kepariwisataan dan meningkatkan objek wisata, meningkatkan mutu pelayanan, perluasan dan keanekaragaman objek wisata serta akomodasi lainnya.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga memalalui pengukuran itu dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Tabel 2.2 Konsep Operasional

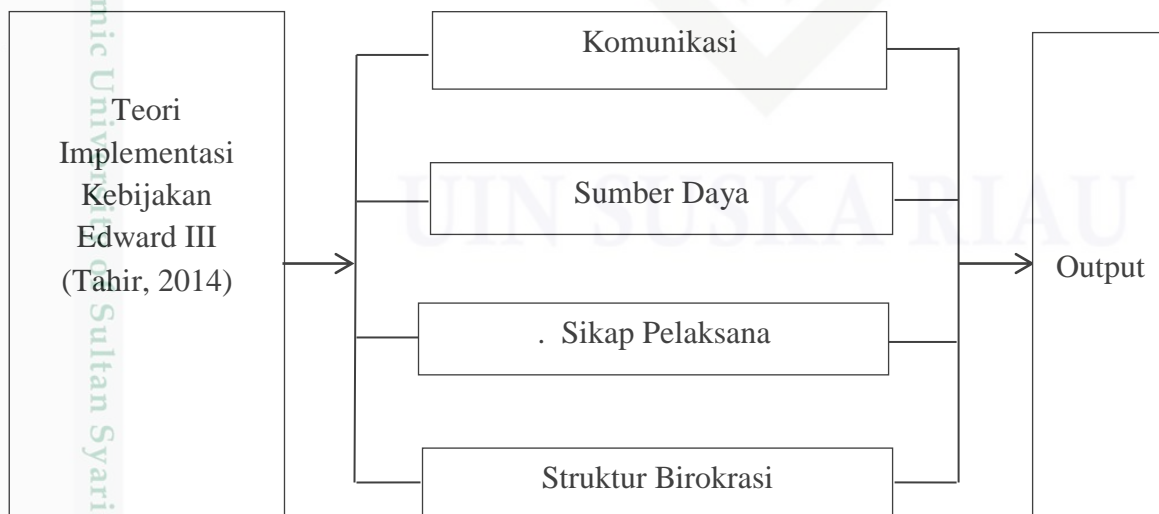
Variabel	Indikator	Sub Indikator
Teori Implementasi Kebijakan Edward III (Tahir, 2014)	1. Komunikasi	1. Tranmisi 2. Kejelasan Komunikasi 3. Konsistensi Komunikasi
	2. Sumber Daya	1. Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	3. Sikap Pelaksana	1. Penetapan Staf 2. Hambatan
	4. Struktur Birokrasi	1. SOP (Standard Operating Procedures) 2. Tanggung Jawab

Sumber: Teori Implementasi Kebijakan Edward III (Tahir, 2014)

2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dukungan teori yang diperoleh dan dijadikan sebagai rujukan konseptual, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam memperoleh data, untuk menyusun Skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti yang terletak di Jalan Terpadu Dorak Komplek Perkantoran Bupati Kepulauan Meranti. Adapun waktu pelaksanaan penelitian yaitu mulai dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yakni suatu penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial atau untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan dan menyimpulkan berkenaan masalah yang diteliti. Pendekatan Kualitatif menurut (Sugiyono, 2003) bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena. Sedangkan Pendekatan Kuantitatif menurut (Sugiyono, 2003) yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui variabel mandiri baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menjawab dan menganalisa Analisa Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga kabupaten Kepulauan Dalam Pengembangan Pariwisata.

3.2.2 Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah:

- a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan dan hasil wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti, media internet, serta berbagai literatur dan tinjauan pustaka yang relavan dan mendukung penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah:

- a. Observasi

Menurut (Sugiyono, 2009) Obsevasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan

Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2009) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian melalui *key person*. Adapun yang menjadi informan penelitian (*key person*) dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti ataupun buku-buku, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian atau subjek penelitian atau biasa disebut dengan responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Informan penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada dilapangan. (Arikunto, 2013) menjelaskan bahwa subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang dicari untuk mengungkap fakta-fakta penelitian.

Untuk penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai key informan ini menurut (Sugiyono, 2010) dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang menjadi key informan benar-benar mengetahui informasi tentang permasalahan dalam penelitian ini. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

N o	Subjek Penelitian	Jumlah Informan
1.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1
2.	Kepala Bidang Pariwisata	1
3.	Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata	1
4.	Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1
5.	Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata	1
6.	Pengunjung	1
	Jumlah	6

(Sumber: Data Olahan Peneliti 2021)

3.5 Teknik Analisa Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah-langkah teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisa data dalam penelitian ini. Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami data yang dikumpulkan. Data yang telah dikumpulkan dari lapangan melalui observasi, wawancara diolah dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting.

b. Penyajian Data

Dalam proses penyajian data peneliti menyajikan data secara jelas dan singkat untuk memudahkan dalam memahami masalah-masalah yang diteliti, baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk teks bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah bagian ketiga dan merupakan unsur penting dalam teknik analisa data pada penelitian kualitatif sebagaimana model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Burhan Bungin, 2003:69) peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang menunjang diklarifikasi kembali, baik dengan informan dilapangan maupun dari hasil diskusi demi penambahan kelengkapan data. Apabila hasil klarifikasi memperkuat kesimpulan atas data, maka pengumpulan data sudah bisa dihentikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibukota Selatpanjang. Jumlah Penduduk kabupaten ini berjumlah 206.116 (2020) jiwa dengan luas wilayah 3. 707,84 km². Adapun nama **Meranti** diambil dari nama gabungan “Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Tebing Tinggi”. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kewadenan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1990/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 JULI 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 9 kecamatan, 5 kelurahan dan 96 desa (dari total 166 kecamatan, 268 kelurahan dan 1.591 desa diseluruh Riau).

4.2 Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia – Malaysia – Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam – Tj. Balai Karimun. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan Negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu berfungsi sebagai beranda depan Negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri.

Luas Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3.707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km². Berikut batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti:

Utara : Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis
 Timur : Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
 Selatan : Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
 Barat : Kabupaten Bengkalis

4.3 Gambaran Singkat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti

Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) merupakan unsur pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dibidang Pariwisata, bidang Pemuda dan Olahraga serta bidang Ekonomi Kreatif. Kantor DISPARPORA dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Kantor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DISPARPORA berdiri pada tahun 2011. Berdasarkan pasal 8 tentang urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kepulauan Meranti mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan. Serta Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti.

UU No. 23 Tahun 2014 telah mengatur pembagian urusan pemerintahan daerah menjadi 3 urusan yakni urusan pemerintah absolut, urusan konkuren dan urusan umum. DISPARPORA dalam menjalankan fungsi urusan pemerintah konkuren membagi urusan pemerintah konkuren menjadi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti adalah dibidang Pemuda dan Olahraga sedangkan untuk Urusan pilihan adalah dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1. Urusan Wajib (Pemuda dan Olahraga)

Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepemudaan olahraga yakni dengan memberikan pembinaan mental, spiritual, pelatihan, pemberian anugerah bagi pemuda yang kreatif, penyuluhan, sosialisai terhadap penyalahgunaan obat-obat terlarang serta adiktif berbahaya lainnya, mengikutsertakan pemuda pada ajang-ajang pertukaran pemuda, pramuka, jambore pemuda. Pemilihan pemuda berbakat dan pemilihan duta wisata dan kegiatan kreatifitas pemuda lainnya.

Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan olahraga yang sarannya dilaksanakan dimasyarakat seperti menyediakan sarana dan prasarana olahraga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masyarakat. Pengiriman atlit berbakat dan berprestasi keajang olahraga daerah dan nasional. Pembinaan dan pembibitan olahraga melalui kegiatan persatuan latihan PPLP DAN PPLD. Memberikan uang pembinaan pada olahraga yang berprestasi dan kesejahteraan bagi atlit pelajar. Mengikuti kejuaraan POPDA dan Kejurda. Pembinaan dan pelatihan olahraga bagi penyandang cacat. Pengembangan kelembagaan pemuda dan olahraga. Sebagaimana yang tertuang dalam target Indikator Sasaran RPJMD tahun 2016-2021.

Meningkatnya peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah serta meningkatnya prestasi olahraga melalui program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, program peningkatan peran serta kepemudaan. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, program peningkatan kewirausahaan dan kecaakapan hidup pemuda. Program pembangunan kebijakan dan mengenai olahraga. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Adapun Indikator yang merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauhmanan posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya adalah:

- a. Pemuda yang berprestasi dunia olahraga
 - b. Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga
 - c. Indeks kepuasan masyarakat.
2. Urusan Pilihan (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan objek wisata.

Pembenahan objek wisata dan mendata potensi wisata. Menciptakan objek objek wisata baru dengan penningkatan dan pengembangan pariwisata bertujuan untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan ke Meranti sehingga dapat meningkatkan pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis kerajinan local dan potensi yang ada.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target pengunjung wisata, antara lain:

- a. Promosi pariwisata melalui media cetak, media elektronik, leaflet/brosur, website dan keikutsertaan dalam pameran promosi wisata;
- b. Koordinasi dan kerjasama dengan mitra kepariwisataan untuk meningkatkan daya dukung sarana wisata (PHRI, ASITA, HPI, HIPHI, Asosiasi Profesi, INCA, dan lain sebagainya);
- c. Pembinaan dan penyuluhan bersama Tim Pembinaan Usaha Hiburan (TPUH) terhadap pengelola usaha hiburan.

4.4 Visi Dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti

Visi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti

“Terwujudnya Meranti Sebagai Daerah Tujuan Wisata Yang Berbasis Lokal Serta Pengembangan Pemuda Dan Olahraga Yang Produktif, Mandiri dan Berprestasi”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Meningkatnya destinasi pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti yang berdaya saing tinggi dan melestarikan kesenian daerah.
2. Meningkatnya pemberdayaan pemuda yang produktif, berdaya saing tinggi dan berprestasi dalam dunia olahraga
3. Meningkatnya pelayanan publik dan sarana prasarana pemuda dan olahraga.

4.5 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti

Struktur organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan suatu unsur pelaksanaan Pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Meranti melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten pada bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, Umum, Kepegawaian, Perencanaan Program, evaluasi, pelaporan dan administrasi Keuangan dan Perlengkapan.
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
 - 2) Menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan.
 - 3) Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas meliputi umum, kepegawaian, program, keuangan, dan perlengkapan.
 - 4) Melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana.
 - 5) Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas.
 - 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
 - 7) Melaksanakan tugas kedinasannya lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub bagian umum, kepegawaian dan program; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sub bagian keuangan dan perlengkapan.

3. Bidang Pariwisata

- a. Bidang pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, analisis pasar, promosi dan sarana promosi serta pelayanan informasi kepariwisataan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan dibidang industri pariwisata.
- b. Bidang pariwisata dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan pengkajian, pengembangan model, pengordinasian dan penyusunan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan.
 - 2) Penyiapan bahan pengordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dibidang pariwisata.
 - 3) Penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah secara holistic integrative dibidang pariwisata dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah.
 - 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Anggaran Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang pariwisata.
- 6) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang pariwisata.
- 7) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemasaran pariwisata.
- 8) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan.
- 9) Pelaksanaan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata dengan institusi/lembaga didalam dan luar negeri.
- 10) Pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik didalam maupun diluar negeri.
- 11) Pelaksanaan pembinaan, partisipasi, dan fasilitasi penyelenggaran promosi kepariwisataan terpadu antar/ dengan kabupaten/ kota dan stakeholder pariwisata lainnya.
- 12) Pengelolaan pusat informatika pariwisata, pemberian layanan informasi dan menyebarkan bahan informasi kepada wisatawan dan masyarakat.
- 13) Pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata.
- 14) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program bidang pemasaran, dan

15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Susunan Organisasi Bidang Pariwisata, terdiri dari:

- 1) Seksi Pengembangan destinasi pariwisata
- 2) Seksi pengembangan pemasaran pariwisata, dan
- 3) Seksi pengembangan industri pariwisata.

4. Bidang Ekonomi Kreatif

a. Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas perumusan standar kebijakan dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, IPTEK, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia, dan budaya.

b. Bidang Ekonomi Kreatif dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia.
- 2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia.
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang ekonomi kreatif kepada kepala dinas; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- c. Susunan Organisasi Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
 - 1) Seksi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya,
 - 2) Seksi ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek, dan
 - 3) Seksi kerjasama pengembangan ekraf.

5. Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Kepemudaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- b. Bidang Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga.
 - 2) Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktifitas dan program remaja dan pemuda serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi.
 - 3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga-lembaga masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengurusan serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengendalian program pendayagunaan dibidang kepemudaan dan olahraga.

- 4) Perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikann oleh Kepala Dinas.
- c. Susunan Organisasi Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - 1) Seksi kepemudaan,
 - 2) Seksi olahraga, dan
 - 3) Seksi sarana prasarana pemuda dan olahraga.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TIPE B**

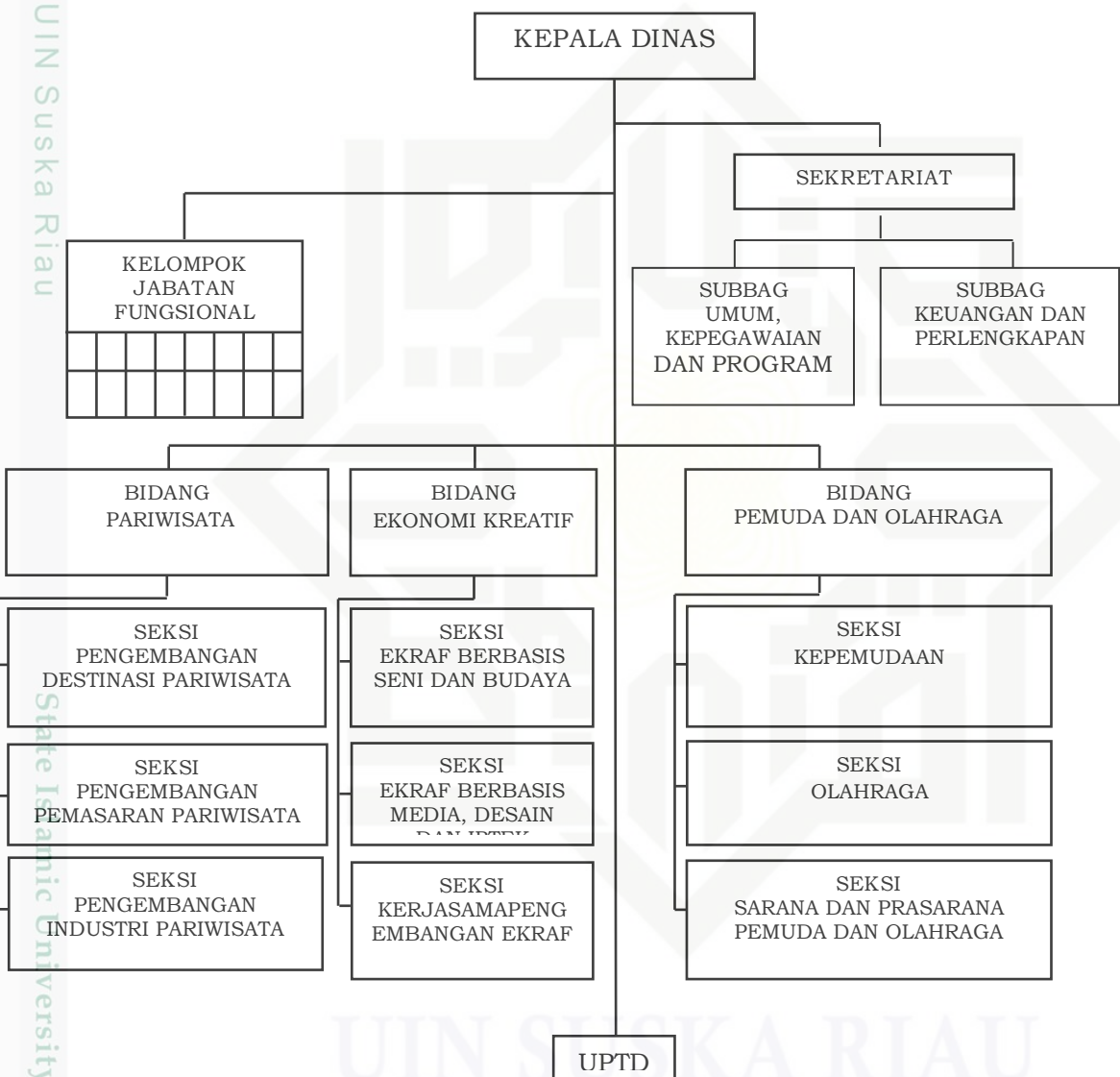
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,
Ttd

IRWAN

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Meranti**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Sumber Daya Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti

Sumber daya yang terdapat pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti sangat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan pelaksanaan kegiatan secara optimal, sumber daya yang tersedia pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti berupa sumber daya manusia yang melekat pada personil/pegawai dan sumber daya lainnya berupa sarana.

Mengacu pada klarifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

- Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Pendidikan:

Tabel 4.1 Jumlah ASN Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Pendidikan

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 2 (S.2)	3
2	Strata 1 (S.1)	10
3	Diploma III (D.3)	6
4	Diploma II (D.2)	0
5	SLTA	11
JUMLAH		30

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti 2021

Dari komposisi Pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti yang keseluruhan berjumlah 30 orang terdiri dari 3 orang berpendidikan S-2, 10 orang berpendidikan S-1, 6 orang Diploma III (D.3) dan 11 orang berpendidikan SLTA/Sederajat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan jenis kepegawaian:

Tabel 4.2 Jumlah ASN Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Jenis Kepegawaian

NO	JENIS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	PNS	30
2	Pegawai Kontrak	35
JUMLAH		65

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti 2021

Dari komposisi Pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti yang keseluruhan berjumlah 65 orang terdiri dari 30 orang PNS dan Pegawai Kontrak 35 Orang.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Analisa Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Kepulauan Meranti Pengembangan Pariwisata, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembanagan pariwisata belum optimal, karena Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga kurang melakukan pelaksanaan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat sehingga informasi yang didapatkan oleh masyarakat kurang maksimal. Sumberdaya di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terlebih khusus di bidang pariwisata dapat di simpulkan belum optimal, kerena sumberdaya di bidang pariwisata masih kekurangan para staf yang memiliki pengetahuan khusus dalam bidang pariwisata. Sikap Pelaksana di Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat disimpulkan sudah cukup baik karena para staf melaksanakan tugasnya dan patuh akan perintah kepala dinas, tetapi penetapan staf yang terjadi di bidang pariwisata masih kurang memiliki keahlian khusus di bidang pariwisata sehingga pemahaman dibidang pariwisata kurang dimiliki staf. Struktur Birokrasi di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat disimpulkan belum optimal karena belum ada *SOP* yang mengataur tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti hanya berpedoman berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak terlaksananya kebijakan pengembangan pariwisata kurang baik dalam pelaksanaannya karena keterbatasan anggaran dalam pengembangan atau peningkatan obyek wisata yang juga berpengaruh keterbatasan sarana dan prasarana tersedianya sarana dan prasarana yang ada tentu saja mempengaruhi proses pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan. Kurang baiknya implementasi kebijakan pengembangan juga di sebabkan oleh kemitraan dan partisipasi masyarakat yang masih kurang, kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata di daerahnya menyulitkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan pengembangan pariwisata. Beberapa faktor tersebut menjadi faktor penghambat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Kepulauan Meranti.

6.2 Saran

Dari beberapa hasil penelitian yang penulis dapatkan, maka penulis memberikan saran atau masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak. Adapun saran-saran yang penulis utarakan adalah sebagai berikut:

1. Agar komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti harus melakukan sosialisasi secara rutin kepada pihak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dalam hal ini masyarakat. Diharapkan kepada pemerintah dapat meningkatkan manajemen pelayanan kepada masyarakat yakni menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini para staf yang dinilai mampu memberikan segala bentuk tindakan yang sesuai dengan kompetensi yang di miliki. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat mempertahankan karakter yang telah dipupuk bersama dalam mengimplimentasikan kebijakan pengembangan pariwisata agar tetap memberi pengembangan objek wisata yang baik. Diharapkan kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga agar dapat membuat *SOP* sehingga mekanisme/prosedur pelayanan yang jelas, sistematis, tidak tidak berbelit-belit dan selalu dipahami oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan.

2. Diharapkan kepada Pemerintah daerah untuk dapat memberikan anggaran/ dana *APBD* kepada Instansi yang terkait dalam kebijakan pengembangan pariwisata maupun pihak pelaksana kebijakan sesuai dengan dana/ anggaran yang diharapkan. Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan kepada peneliti lain untuk mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut dengan mengambil wilayah penelitian yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Quran dan Terjemahan

Muljadi, A. J. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Arikunto, S. 2013. *Prosdur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Islamy, M. Irfan. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Murdiastuti, Anastasia, dkk. 2014. *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Democratic Governance*. Surabaya : Pustaka Radja

Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata (Sebuah Pengantar Perdana)*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita

Syafie, I. 1999. *Ilmu Administrasi publik*. Jakarta : Rineka Cipta

Suharto, Edi. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT Karya Unipress

Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : ANDI

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : CV. Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Penelitian :

Hasbyallah. 2018. *Analisis Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Lingga*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Soaial. Ilmu Administrasi Negara. UIN SUSKA RIAU. Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Janila Putri. 2018. *Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pemerintahan Kota Payakumbuh Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Ilmu Administrasi Negara. UIN SUSKA RIAU. Riau

Welsha Fivylandra. 2018. *Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Agam Dalam Pengelolaan Objek Wisata Muko-Muko*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Ilmu Administrasi Negara. UIN SUSKA RIAU. Riau

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017-2025

Jurnal :

Atia, Nurul. (2018). *Strategi Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Mempromosikan Wisata Kuliner Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti*. JOM FISIP Vol. 5 : Edisi II Juli - Desember 2018

Aisyah, Siti. (2018). *Pengembangan Ekowisata Bahari Pantai Kuala Merbau Desa Kualu Merbau, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau*. Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau

Prayogi, Restu. (2020). *Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pelestarian Pariwisata Perang air 2016-2018*. JOM FISIP Vol. 7 : Edisi I Januari – Juni 2020

Subarkah, Alwafi Ridho. (2018). *Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)*. Jurnal Sospol, Vol 4 No 2 (Juli-Desember 2018), Hlm 49-72

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Wawancara dengan Ibuk Aida Fitriani, S.Pd, M.Pd Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

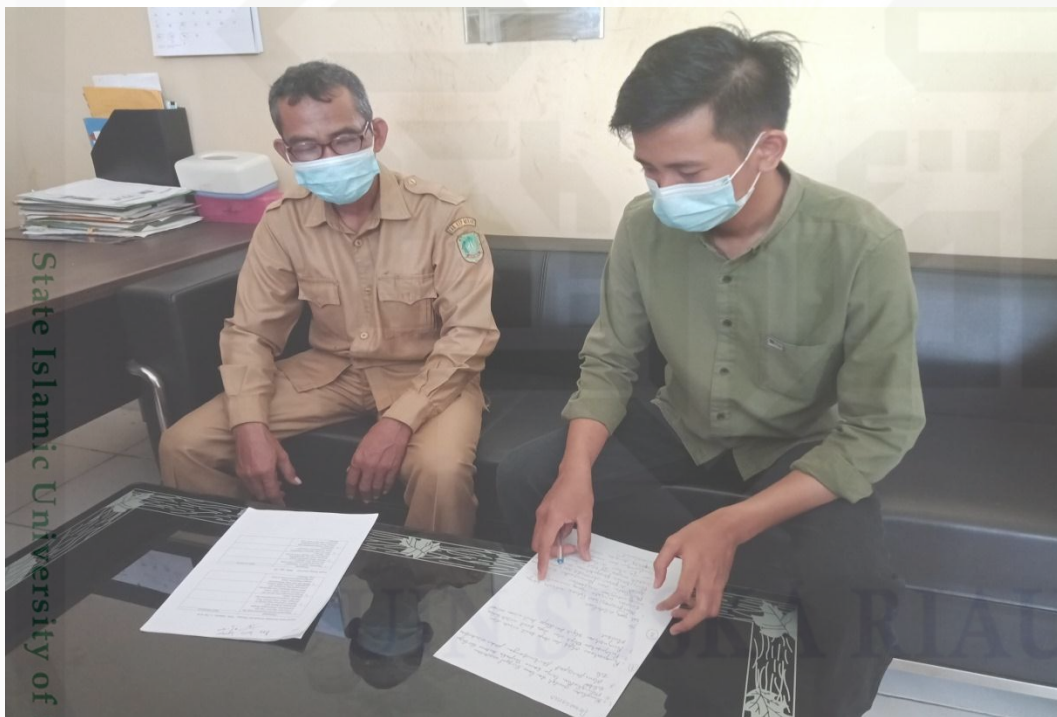
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.2 Wawancara dengan Bapak Surip, S.Pd, MM Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.3 Wawancara dengan Bapak Topan Iskandar, S.IP Kepala Seksi Pengembangan Industri wisata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.4 Wawancara dengan Pengunjung Ulfa Yunisa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/287/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 20 Januari 2021 M
6 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Riyan Arfil
NIM. : 11770513210
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Analisa Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Pariwisata"**. Untuk itu kami
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38086
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/287/2021 Tanggal 20 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

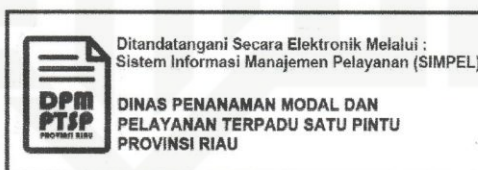
1. Nama	: RIYAN ARFIL
2. NIM / KTP	: 11770513210
3. Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: ANALISA KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA
7. Lokasi Penelitian	: DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
 Up. Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/244/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 19 Januari 2021 M
 5 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada
Yth. Devi Deswimar, S.Sos, M.Si
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

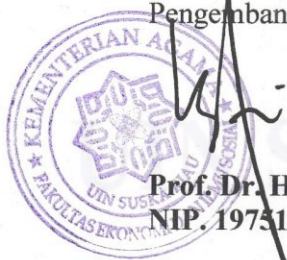
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Riyan Arfil
 NIM : 11770513210
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Analisa Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Pariwisata**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti. MS, SE, M. Si, Ak, CA
 NIP. 19731112 199903 2 001

Hak cipta © UIN Suska Riau
 Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0763) 33630
SELATPANJANG

Kode Pos 28733

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 053/DPMPTSPTK/III/2021/SKP/13

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari **Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38086 Tanggal 27 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama	: Riyan Arfil
NIM	: 11770513210
Program Studi	: Administrasi Negara
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: Analisa Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Pariwisata
Lokasi Penelitian	: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : **Selatpanjang**
 Pada tanggal : **03 Maret 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



AFRIZAL DHARMA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19740401 199903 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau;

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Terpadu Telp. (0763) 33235 Fax. (0763) 33235

SELATPANJANG



Kode Pos. 28753

Selatpanjang, 22 Februari 2021

Kepada

Yth. Ketua Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau
di –

Pekanbaru

Menindak lanjuti surat dari Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor : Un. 04/F.VII/PP.00.9/287/2021. Tanggal 20 Januari 2021, Perihal : Izin Riset. Bahwa kami Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Menyatakan yang Bernama :

Nama	: Riyan Arfil
No. Mahasiswa	: 11770513210
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh)

Bahwa **Benar** nama yang di atas telah melakukan Riset di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Judul Riset :

“Analisa Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Pariwisata”.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



RIZKI HIDAYAT . S.STP. M. Si
Pembina Tk. I

NIP. 19830219 200112 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Riyan Arfil, Lahir di Selatpanjang, pada tanggal 29 April 1999, Agama Islam. Penulis merupakan anak Pertama dari Dua Bersaudara, dari pasangan Ayahanda Ramli dan Ibunda Indriyani. Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Selatpanjang pada tahun 2005-2011, setelah itu melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) di MTsN 1 Selatpanjang pada tahun 2011-2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Selatpanjang pada tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan studi ke Jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2021. Pada tahun 2020 penulis melaksanakan PKL di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti selama 45 hari. Dan penulis juga melaksanakan KKN di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Email Penulis : riyanarfil04@gmail.com